

Daftar Pustaka

1. Buku

- Afandi, Pandi, *Concept & Indicator Human Resource Management for Management Research*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Asyad, Gusman, *Penyebab Korupsi*, Cilacap: Media Pustaka Indo, 2025).
- Dewi, Fransisca Iriani R Dewi, *Regulasi Diri: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Andi, 2019.
- Dharmaresta, Basu Swastha dan Ujang Sumarwan. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Herman dan Haerul, *Etika Administrasi Publik*, Makassar: Asha Publishing, 2005
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020.
- Kohlberg, Lawrence, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral (Terjemahan)*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta: Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Hukum Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh, *Motede Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Setiadi, Elly M, M, Kolip Usman. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Situmorang, Viktor M. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Subiyantoro, Singgih, *Teori Belajar*, Klaten: Lakeisha, 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Pratiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Susanto, Eko Edy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: CV Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Thoha, Miftah., *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokarasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

2. Jurnal

Adrie, “Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Prespektif Hukum Kepegawaian”, *Aktual Justice, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurahrai*, (2020).

Artisa, R.A., “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Review terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Pembangunan Kebijakan Publik* (2015).

Efendy, Arif, “Kajian Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Widya Praja*, Vol.2, No.1 (2022).

Rahmatin, Arihun, “Implementasi Kebijakan Disiplin PNS dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal MSDA*, Vol.6, No.2 (2018).

Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Ilmiah Dinamika Sosial I*, (2017).

Putri, Gusti Ayu Ade Sukma Surya, I Nyoman Gede Remaja, I Nyoman Surata, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng”, *Kertha Widya, Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2 (2022).

Rachmani, Widhi, Ismunarno, Sabar Slamet, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Recidive*, Volume 10 No.2 (2021).

Sudrajat, Tedi, “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3 (2008).

Syafei, Ade Wirma, Syurmita, Indah Sholikhatum Nisa, Analisis Pengaruh Teori Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan

Keuangan, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol.5, Nomor 1 (Februari 2024).

Yhunita, Isna dan Yunita, Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja, *Journal of Education, Humaniora dan Social Science*, Vol 1 (Agustus: 2018).

3. Tesis

Agung Wijaya, “Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang”, (Tesis Magister Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, “Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

Mada Aji Susanto, “Efektivitas Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik/Good Governance (Studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

4. Artikel Online

Antonius Alijoyo, *Pertahanan 3 Lapis (The 3 Lines of Defence) – Konteks ERM Perusahaan Publik Indonesia*. CRMSINDONESIA.org, <https://crmsindonesia.org/publications/pertahanan-3-lapis-the-3-lines-of-defence-konteks-erm-perusahaan-publik-di-indonesia/>, diakses pada 25 November 2025.

Furqan, M Indra, , *Survei KPK: Hanya 13 Persen Laporkan Gratifikasi!*, [aclc.kpk.go.id](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240806-), <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240806->

[survei-kpk-hanya-13-persen-lapor-gratifikasi](#), diakses pada 13 Desember 2025.

Heru Supriyanto, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Tarakan, *The Three Lines off Offence?*, DJPB.KEMENKEU.go.id, <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/artikel/2831-the-three-lines-of-offence.html>, diakses 25 November 2025.

Liputan 6, Preventif Adalah: Pengertian, Ciri dan Contoh dan Dampaknya, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5755456/preventif-adalah-pengertian-ciri-contoh-dan-dampaknya>? diakses pada 11 Januari 2026.

Nafiatul Munawaroh, *Gratifikasi Wajib Dilaporkan, Ini Batas Waktunya*, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gratifikasi-wajib-dilaporkan--ini-batas-waktunya-lt5d753c2c19a69/>, diakses pada 11 Januari 2026.

Pusat Edukasi Antikorupsi, *Yuk, Pahami Sekilas tentang Teori Tindak Kecurangan*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-yuk-pahami-sekilas-tentang-teori-tindak-kecurangan-frau>, diakses pada 13 Desember 2025.

Pusat Jurnal Hukum, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Panduan Praktis untuk Publikasi Ilmiah*, <https://jurnalhukum.id/artikel/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-panduan-praktis-untuk-publikasi-ilmiah/>, diakses tanggal 13 Desember 2025.

Prayudi, Ahmad, *PDCA: Perbaikan Kualitas Berkelanjutan Dengan Siklus Berulang*, <https://ahmadprayudi.blog.uma.ac.id/2023/06/11/pdca-perbaikan-kualitas-berkelanjutan-dengan-siklus-berulang/>, diakses pada 11 Januari 2026.

Sabrina, Fia Malika, *Yuk Pelajari Kode Etik dan Kode Perilaku PNS*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16040/Yuk-Pelajari-Kode-Etik-dan-Kode-Perilaku-PNS.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2025.

Survei Penilaian Integritas 2025, *Membangun Integritas Mewujudkan Pelayanan Publik Bebas Korupsi*, spi.kpk.go.id,

<https://spi.kpk.go.id/populasi/>, diakses pada 11 Januari 2026.

Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2024: “Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan”*, ti.or.id,

<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>, diakses pada 11 Januari 2026.

5. Peraturan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477.

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 671.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 384.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 934.
- PMK 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Berita Negara Tahun 2024 Nomor 773.